



Bupati Serahkan DIPA 2020 ke KPA

Realisasikan DAK Bupati Akui Dilema

PUTUSSIBAU - Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir tak memungkiri mengenai dilema yang dihadapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu, dalam merealisasikan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal tersebut diungkapkan Bupati saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 kepada Kuasa Penerima Anggaran (KPA) di Kapuas Hulu, di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kemarin (26/11).

"Seperti pada pemanfaatan DAK untuk pembangunan infrastruktur jalan, itu diatur agar pembangunannya pada satu poros, sementara keadaan di lapangan kebutuhan pembangunan itu tersebar," ungkapnya.

Bupati menjelaskan bahwa penyaluran DIPA tersebut merupakan lanjutan penyerahan DIPA dari Presiden Joko Widodo ke kementerian dan Gubernur. Terkait anggaran 2020, dijelaskan dia bahwa Presiden telah menekankan anggaran tersebut harus dihabiskan dengan efektif dan memberi *output* yang diharapkan. "Dana itu harus habis dan harus tepat sasaran, sehingga membawa manfaat bagi masyarakat. Ini pesan Presiden," tandasnya.

Di sisi lain, Bupati juga mengungkapkan bahwa DAK diberikan, namun tidak sepenuhnya dipercayakan ke daerah dalam pengelolaannya. "Ini kadang menjadi dilema di

lapangan, karena aturan itu memaksa realisasi tidak sesuai kebutuhan di lapangan. (Padahal) apabila itu diserahkan ke daerah sepenuhnya, tentu akan sesuai dengan kebutuhan," tegasnya.

Di sisi lain, ada pula serapan DAK yang tidak maksimal di daerah, diakui dia, karena kesalahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan. Dimisalkan dia seperti pada pembangunan rumah sakit, di mana DAK tidak terserap Rp25 miliar karena kesalahan dari saat perencanaan.

"Untuk itu saya imbau agar OPD di daerah, ketika dikasih DAK dari Pusat, maka harus bisa diserap dengan baik. Saya minta Januari 2020, pelelangan di OPD sudah bisa dilakukan prosesnya," pungkasnya.

Pemkab melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Putussibau melakukan penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2020 kepada KPA di Kapuas Hulu. DIPA tersebut secara simbolis disalurkan oleh Bupati kepada para KPA dari berbagai instansi di Kapuas Hulu.

Pada kesempatan itu, Kepala KPPN Putussibau Heru Martono mengatakan, ada 28 DIPA untuk tahun 2020, dengan nominalnya Rp234,175 miliar. Jumlah tersebut, menurut dia, belum termasuk dana transfer daerah sebesar Rp184,67 miliar yang berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan juga Dana Desa (DD), Rp274,335

miliar. "Dibanding tahun lalu, memang ada penurunan anggaran pada DAK fisik, namun ada pula kenaikan pada DD," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang PPA 1 Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Negara Provinsi Kalimantan Barat, Dirgo, menuturkan bahwa pihaknya tidak semata memberikan DIPA saja. Mereka juga bertugas melakukan pembinaan kepada satuan kerja (Satker). Ia mengimbau para KPA agar memeriksa kembali dengan teliti berkas penganggaran, ketika DIPA diterima. "Pastikan itu sesuai usulan. Siapa tahu KPA masih nama pejabat lama," ujarnya.

Kegiatan yang tidak sesuai rencana dalam DIPA, menurut dia, bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada. Dia menambahkan, selanjutnya tinggal KPA yang menyiapkan syarat revisi mata anggaran untuk kemudian secepatnya diserahkan kepada mereka di Kanwil. "Kalau ada perubahan segera sampaikan di Januari 2020," tegasnya.

Dirgo berharap KPA di Kapuas Hulu melakukan persiapan awal terkait belanja modal di akhir tahun 2019. Dengan

persiapan seperti itu, harapan dia pada 2020, bisa segera dilaksanakan pekerjaannya. Dengan begitu, dia menghendaki agar anggaran juga dapat cepat terserap. "Anggaran jangan banyak menumpuk di akhir tahun," ujarnya.

Dirgo memaparkan

pada data tanggal 22 November, indikator kinerja pelaksanaan anggaran Kapuas Hulu dari KPPN Putussibau menunjukkan rata-rata mencapai 92,97 persen. Hal ini, menurut dia, mungkin terbentur pada realisasi DAK fisik. "DAK fisik 2020 jangan sampai tidak salur. Ini harus saling koordinasi untuk kelancarannya," tuntas Dirgo.

Sebelumnya Gubernur Kalbar Sutarmidji menyayangkan tak terserapnya Rp170-an miliar DAK fisik. Menurutnya, salah satu penyebab kondisi tersebut lantaran proses perencanaan yang bersamaan di tahun berjalan dengan pengerjaan fisik. "Harusnya perencanaan itu satu tahun sebelumnya, sehingga ketika Januari (awal tahun), sudah bisa mulai tender," katanya.

Dalam hal ini ia mengajak dinas terkait khususnya PUPR dan Bappeda mengubah pola pikir. Sebab, Midji, sapaan akrabnya menilai, jajaran birokrasi di sana kurang inovatif. "Sekarang ini menjabarkan visi-misi kepala daerah, harusnya Bappeda konsultasi ke saya, (tanyakan) apa mau bapak? Ini (atau) itu. Oke, nah



yang priorotas yang mana, siapkan perencanaannya. Perencanaan harusnya satu tahun sebelumnya,” kata Gubernur usai kegiatan penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2020 di Pendopo Gubernur Kalbar, Selasa (19/11) lalu.

Saat perubahan anggaran yang lalu, dirinya sudah meminta perencanaan agar segera ditender. Namun, dia menyayangkan, ada permasalahan lain secara aturan, sehingga harus mundur 2 - 3 bulan. “Akhirnya tidak mengejar, terpaksa Januari, sama juga masalahnya. Itu yang harus diselesaikan, oleh Pusat juga itu masalah,” ucapnya.

Ke depan orang nomor satu di Kalbar itu berharap harus ada percepatan, terutama dalam penyerapan anggaran agar bisa maksimal. Seperti tahun 2018 lalu, ia menyebut serapan anggaran di Kalbar sudah cukup tinggi yakni mencapai sekitar 98 persen.

“Tahun ini ya mungkin 93 - 95 persen itu sudah bagus. Penyerapan anggaran diperhatikan betul, kendalanya koordinasikan. Terutama DAK fisik, jangan sampai kembali lagi ke

pusat, rugi, cari duitnya susah,” tutupnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kalbar Edih Mulyadi telah mengungkapkan ada Rp170 miliar DAK Fisik dari Pemerintah Pusat yang mengalami gagal salur atau tidak terserap di tahun ini. Sampai saat itu, diakui dia, baru 68 persen DAK fisik yang terserap dari total sekitar Rp2,6 triliun alokasi ke Kalbar.

“Masih tahap dua, ada Rp170-an miliar yang gagal salur,” ungkap dia.

Ia mengungkapkan secara keseluruhan DAK fisik baru terserap sebesar 68 persen. Untuk sisanya sekitar 32 persen, belum bisa diprediksi dia apakah akan terealisasi semuanya. “Nah waktu yang tinggal sebulan ini sangat krusial. Saya tidak bisa prediksi, karena proses *upload* dokumen untuk tahap tiga dalam proses. Jadi kami tidak bisa menentukan secara pasti berapa (total) yang tidak terserap,” terangnya.

Namun yang sudah bisa dipastikan di tahap kedua, dikatakan dia, setidaknya ada Rp170-an miliar yang gagal salur. Angka tersebut, menurut dia, merupakan total sekitar Rp2,6 triliun DAK fisik yang masuk ke Kalbar di 2019.

Hal itu terjadi menurutnya karena masalah yang sangat mendasar. Setelah dicermati, ada hal yang sangat penting untuk dilakukan tinjauan atau analisis terkait proses perencanaan oleh masing-masing satuan kerja. “Ada suatu kegiatan yang ternyata pada saat pencairan pertama selesai. Padahal perencanaannya untuk tiga tahap. Kalau tidak salah sampai Rp15 miliar, tapi Rp5 miliar selesai, jadi jelas yang

Rp10 miliar tidak terserap, tidak digunakan,” paparnya.

Masalah ini dikatakan menjadi salah satu perhatian mereka. Karena tentu dampaknya, dikhawatirkan dia, akan dirasakan pada beberapa hal. “Pertama, jika dana APBN atau APBD tidak diserap atau diimplementasikan tentu akan berpengaruh pada perekonomian daerah. Karena dana dari negara merupakan alat untuk proses pembangunan,” kata dia.

Solusinya, mereka terus menjalin komunikasi dengan seluruh instansi serta pemerintah daerah (Pemda), untuk memastikan bahwa pihak terkait paham dengan persoalan. Kedua, ia menilai ini terjadi karena ada prosedur baru di tahun 2019. “Yakni DAK fisik harus melewati ulasan oleh Inspektorat atau Aparat Pengawasan Internal Pemerintah,” timpal dia.

Di beberapa tempat, faktanya proses ulasan oleh APIP setempat, diakui dia, cukup memakan waktu. “Kedua, ada juga karena proses *review* ini baru jadi belum dipahami secara baik oleh daerah. Ada APIP yang tidak hanya *review*, justru mereka melakukan audit. Ini kan beda konsep antara *review* dengan audit. Jadi ini salah satu kendala,” jelasnya.

Meski demikian ia cukup bersyukur bahwa respons Gubernur dan beberapa kepala daerah sudah sangat baik. Dengan respons tersebut, harapan dia, masalah yang dihadapi bisa dicarikan solusi secara bersama-sama. “Dan Beliau (Gubernur) juga menyayangkan, itu rugi bagi daerah. Maka dari itu kami terus jalin komunikasi,” pungkasnya. (arf)



ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TA 2020 SE-KALBAR :

1. Pemprov Kalbar	: Rp3,82 triliun
2. Kabupaten Bengkayang	: Rp976,4 miliar
3. Kabupaten Landak	: Rp1,27 triliun
4. Kabupaten Kapuas Hulu	: Rp1,64 triliun
5. Kabupaten Ketapang	: Rp1,94 triliun
6. Kabupaten Mempawah	: Rp878,2 miliar
7. Kabupaten Sambas	: Rp1,55 triliun
8. Kabupaten Sanggau	: Rp1,38 triliun
9. Kabupaten Sintang	: Rp1,71 triliun
10. Kota Pontianak	: Rp983,7 miliar
11. Kota Singkawang	: Rp657,5 miliar
12. Kabupaten Sekadau	: Rp837,4 miliar
13. Kabupaten Melawi	: Rp981,6 miliar
14. Kabupaten Kayong Utara	: Rp730 miliar
15. Kabupaten Kubu Raya	: Rp1,28 triliun



ISTIMEWA

SERAH DIPA: Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir menyalurkan DIPA kepada Kuasa Penerima Anggaran dari Badan Statistik Kapuas Hulu, di Aula Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu, kemarin (26/11).